ABSTARAK

PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Studi Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara

Oleh
NAELMUNAR
214170006

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tetang Penanggulangan Bencana bahwa dalam SKPD mengitegrasikan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD. Minimnya penganggaran penanggulangan bencana baik untuk anggaran pra bencana, saat bencana maupun pada pasca bencana dan kurangnya regulasi kebijakan sehingga menyebabkan tidak efisien dan efektif penganggaran dalam penengulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan anggaran, tolak ukur proyeksi anggaran, besarnya alokasi anggaran keuangan daerah dan realisasi distribusi anggaran penanggulanggan bencana untuk pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana di BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 sampai dengan 2018.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan. Subjek penelitian BAPPEDA, BPBD dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Variabel dalam penelitian ini adalah anggaran penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi anggaran pra bencana, saat bencna dan pasca bencana. Sumber data Dalam penelitian ini, berupa, buku, jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, laporan anggaran BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara, laporan anggaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara dan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Hasil penelitian yaitu Sumber anggaran penaggulangan bencana daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berasal dari anggaran pendapatan hasil daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Kurangnya kemampuan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merencanakan anggaran penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dimana masih banyaknya program dan kegiatan yang masih overlap dalam penyusunan anggaran yang seharusnya bisa dijadikan dalam satu kegiatan dalam perencanaan program anggaran. Anggaran BPBD di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya rata-rata sebesar 0,23 persen pertahun dari anggaran pendapatan belanja daerah, tidak segnifikan dengan jumlah kejadian bencana alam selama tahun 2013 sampai dengan 2018 sebanyak 117 kejadian bencana alam, 46 jiwa yang meninggal dunia dan luka-luka, jumlah penduduk yang terpapar sebanyak 109.971 jiwa. Kesimpulan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana di BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada tahap pra bencana Dana Kontijensi Bencana yang dianggarankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahap saat bencana terjadi BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Dana Siap Pakai yang disediakan dalam bentuk uang persediaan yang dianggarkan kepada BPBD. Pada tahap pasca bencana BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dengan mencairan dana bantuan sosial berpola hibah.Proyeksi pengusulan anggaran yang direncankan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2013 sampai 2018 untuk pra bencana sebesar 28.729.113.000, saat bencana sebesar 2.325.500.000 dan pasca bencana sebesar 36.104.739.915. Rata-rata anggaran pertahun untuk penanggulangan bencana daerah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya sebesar 0,23 persen dari APBD.Realisasi distribusi anggaran BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2013 sampai dengan 2018, untuk pra bencana sebesar 18.051.658.750, saat bencana sebesar 153.869.000, dan pasca bencana sebesar 18.726.680.915.

Kata Kunci: Anggaran, Perencanaan, Kebencanaan, Provinsi Sulawesi Tenggara, *library research*, audit anggaran